



Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan

Darmono^{1*}, Sri Herlina²

¹Program Studi Bisnis Digital, Politeknik Seruyan, Indonesia

²Program Studi Budi Daya Ikan, Politeknik Seruyan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: darmmono298@gmail.com

Abstract. *Small-scale fishermen remain one of the most vulnerable coastal communities due to low financial literacy, limited entrepreneurial capacity, weak institutional support, and restricted access to financing and markets. These challenges highlight the need for a more comprehensive and sustainable empowerment model. This study aims to develop a Small-Scale Fishermen Empowerment Model Based on Financial Literacy and Fisheries Entrepreneurship in Seruyan Regency. A qualitative approach was employed in Seruyan Regency, Central Kalimantan, from March to May 2026. The informants consisted of small-scale fishermen, village officials, and officers from the Seruyan Fisheries Office who were selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that improving fishermen's welfare requires strengthening financial literacy, fisheries entrepreneurship, institutional capacity, and sustainable mentoring through a pentahelix collaboration approach. This study proposes an integrated empowerment model that combines these four pillars to enhance business independence, expand access to finance and markets, and improve the sustainable welfare of small-scale fishermen.*

Keywords: *Financial Literacy; Fisheries Entrepreneurship; Fishermen Institutional Strengthening; Pentahelix Collaboration; Small-Scale Fishermen Empowerment.*

Abstrak. Nelayan kecil merupakan kelompok masyarakat pesisir yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan akibat rendahnya literasi keuangan, terbatasnya kemampuan kewirausahaan, lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Maret–Mei 2026. Informan responden penelitian terdiri dari nelayan kecil, perangkat desa, dan pejabat Dinas Perikanan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan memerlukan penguatan kapasitas melalui literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan, serta pendampingan berkelanjutan berbasis kolaborasi pentahelix. Penelitian ini menghasilkan model pemberdayaan yang mengintegrasikan keempat aspek tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian usaha, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mewujudkan kesejahteraan nelayan kecil secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kelembagaan Nelayan; Kewirausahaan Perikanan; Kolaborasi Pentahelix; Literasi Keuangan; Pemberdayaan Nelayan Kecil.

1. LATAR BELAKANG

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik pada subsektor perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Mereka masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, fluktuasi hasil tangkapan akibat musim, terbatasnya akses

terhadap lembaga keuangan formal, serta ketergantungan pada tengkulak dalam pemasaran hasil perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan nelayan tidak stabil sehingga peningkatan kesejahteraan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan usaha, dan akses terhadap layanan keuangan. Literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman produk keuangan, tetapi juga kemampuan mengelola pendapatan, menyusun perencanaan keuangan, melakukan pencatatan usaha, dan mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat literasi keuangan kelompok petani, pekebun, peternak, dan nelayan masih sebesar 57,97%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 65,43%, sedangkan tingkat inklusi keuangannya mencapai 62,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan masih memerlukan penguatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan usahanya. Selain literasi keuangan, penguatan kewirausahaan perikanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan, diversifikasi usaha, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan jaringan pemasaran.

Nelayan yang memiliki kemampuan kewirausahaan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan pasar serta mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Oleh karena itu, integrasi literasi keuangan dan kewirausahaan perikanan menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi nelayan kecil. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar dengan produksi lebih dari 21 ribu ton per tahun. Meskipun demikian, hasil penelitian Darmono et al. (2025) menunjukkan bahwa nelayan kecil di Kabupaten Seruyan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, penggunaan alat tangkap tradisional, rendahnya kemampuan manajemen usaha, lemahnya kelembagaan, serta ketergantungan pada tengkulak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan belum diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan secara optimal. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya mengkaji literasi keuangan, kewirausahaan, atau pemberdayaan nelayan secara terpisah. Penelitian di Kabupaten Seruyan juga masih berfokus pada pemetaan kondisi sosial ekonomi tanpa menghasilkan model pemberdayaan yang mengintegrasikan literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi pentahelix. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* sehingga diperlukan model pemberdayaan yang

lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model yang mengintegrasikan empat dimensi utama, yaitu literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, dan kolaborasi pentahelix sebagai satu kerangka implementatif yang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengenali potensi, mengakses sumber daya, mengambil keputusan secara mandiri, dan meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi lebih menekankan pada pengembangan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks masyarakat pesisir, pemberdayaan menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Menurut Kusnadi (2021), pemberdayaan nelayan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program. Nelayan kecil merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan aset produksi, teknologi penangkapan, akses permodalan, informasi pasar, dan jaringan usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama akibat perubahan musim, fluktuasi harga ikan, dan hasil tangkapan. Selain itu, ketergantungan terhadap tengkulak dalam pembiayaan dan pemasaran membuat posisi tawar nelayan relatif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan nelayan kecil tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan pengelolaan usaha. Pemberdayaan nelayan kecil memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan jaringan pemasaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan nelayan dalam mengelola usaha, mengakses pembiayaan formal, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan dipandang sebagai proses penguatan kapasitas yang berlangsung secara berkesinambungan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan nelayan kecil

dipahami sebagai proses penguatan kapasitas yang mengintegrasikan literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan berbasis kolaborasi pentahelix. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan nelayan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal, tetapi juga rendahnya kemampuan mengelola usaha, minimnya inovasi, serta lemahnya akses terhadap lembaga pendukung. Integrasi keempat aspek tersebut diharapkan mampu membentuk nelayan yang lebih mandiri, produktif, adaptif, dan berdaya saing dalam mengembangkan usaha perikanan.

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha. Konsep ini mencakup pengetahuan mengenai pengelolaan pendapatan, perencanaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, pembiayaan, serta kemampuan memahami berbagai produk dan layanan keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), literasi keuangan tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan, akan tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam menerapkan pengetahuan tersebut untuk mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang bergantung pada sektor informal. Dalam konteks usaha perikanan, literasi keuangan memiliki peran yang sangat penting karena karakteristik pendapatan nelayan cenderung tidak menentu dan dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, serta fluktuasi harga hasil tangkapan.

Kondisi tersebut menuntut nelayan memiliki kemampuan mengelola arus kas, menyusun prioritas pengeluaran, melakukan pencatatan keuangan, memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, serta merencanakan investasi untuk keberlanjutan usaha. Kemampuan tersebut akan membantu nelayan mengurangi risiko keuangan ketika terjadi penurunan hasil tangkapan atau perubahan harga pasar. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan sering menyebabkan pendapatan usaha tidak dikelola secara produktif sehingga peluang pengembangan usaha menjadi terbatas. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor primer, termasuk petani, pekebun, peternak, dan nelayan, masih memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pesisir masih menghadapi keterbatasan dalam memahami produk keuangan, memanfaatkan lembaga keuangan formal, maupun mengakses pembiayaan usaha.

Rendahnya literasi keuangan tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan nelayan dalam mengembangkan usaha secara mandiri serta meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Sehingga literasi keuangan diposisikan sebagai salah satu komponen utama dalam model pemberdayaan nelayan kecil. Peningkatan literasi keuangan diharapkan mampu memperkuat kemampuan nelayan dalam mengelola usaha perikanan secara profesional, meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan, serta mendukung pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen strategis yang mendukung penguatan kewirausahaan, kelembagaan, dan kemandirian ekonomi nelayan kecil di Kabupaten Seruyan.

Kewirausahaan Perikanan

Kewirausahaan merupakan kemampuan individu dalam mengenali peluang, mengelola sumber daya, mengambil risiko yang terukur, serta menciptakan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam sektor perikanan, kewirausahaan tidak hanya mencakup kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga pengembangan usaha melalui diversifikasi produk, pengolahan hasil perikanan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis. Menurut Putalan et al. (2025), kewirausahaan perikanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing usaha melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi. Kewirausahaan perikanan meliputi kemampuan mengenali peluang usaha, berinovasi, mengelola usaha, mengambil risiko, serta membangun jejaring pemasaran. Nelayan yang memiliki jiwa kewirausahaan tidak hanya menjual hasil tangkapan dalam bentuk segar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah melalui produk olahan, diversifikasi usaha, dan pemanfaatan teknologi digital.

Pendekatan ini berpotensi meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga ikan. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi nelayan untuk memperluas pemasaran melalui media sosial, *marketplace*, dan platform digital. Selain meningkatkan jangkauan pasar, inovasi dalam pengolahan, pengemasan, dan *branding* produk juga mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Oleh karena itu, penguatan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam transformasi usaha perikanan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian Putalan et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan pendapatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kewirausahaan merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

Dalam penelitian ini, kewirausahaan perikanan diposisikan sebagai salah satu pilar utama model pemberdayaan nelayan kecil. Penguatannya diarahkan pada peningkatan kemampuan nelayan dalam mengidentifikasi peluang usaha, menghasilkan produk bernilai tambah, memperluas jaringan pemasaran, serta membangun usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pemberdayaan nelayan kecil serta merumuskan model pemberdayaan berbasis literasi keuangan dan kewirausahaan perikanan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Seruyan. Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, dan Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi dipilih secara purposive karena merupakan sentra perikanan tangkap dengan karakteristik nelayan kecil yang sesuai dengan fokus penelitian serta telah menjadi lokasi penelitian terdahulu mengenai kondisi sosial ekonomi nelayan. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, meliputi nelayan kecil, perangkat desa, dan pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan perikanan dan program pemberdayaan. Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Guest et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial ekonomi nelayan dan aktivitas usaha perikanan, sedangkan wawancara menggali pengalaman, kendala, dan kebutuhan nelayan dalam mengembangkan usaha. Dokumentasi meliputi data Badan Pusat Statistik, laporan Dinas Perikanan, dokumen kelompok nelayan, dan arsip lain yang relevan (Kvale & Brinkmann, 2015). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dianalisis berdasarkan tema-tema utama, yaitu literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan nelayan, hingga diperoleh rumusan Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari nelayan, perangkat desa, dan Dinas Perikanan, sedangkan

triangulasi teknik membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan informan sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Maret–Mei 2026 dengan melibatkan informan dari nelayan kecil, perangkat desa, dan pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian disajikan ke dalam lima tema utama, yaitu kondisi sosial ekonomi nelayan kecil, literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, peran kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan, serta model pemberdayaan nelayan kecil berbasis literasi keuangan dan kewirausahaan perikanan.

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi nelayan kecil di Kabupaten Seruyan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi tingkat kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar nelayan masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional menggunakan perahu berukuran kecil dan alat tangkap sederhana. Pendapatan nelayan bersifat fluktuatif karena dipengaruhi musim penangkapan, kondisi cuaca, dan hasil tangkapan. Pada musim paceklik, banyak nelayan mengalami penurunan pendapatan sehingga memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mengurangi pengeluaran, memanfaatkan tabungan yang terbatas, atau meminjam dana kepada keluarga maupun pengepul.

Temuan tersebut diperkuat oleh perangkat Desa Sungai Bakau yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional dengan pendapatan yang bergantung pada musim dan kondisi cuaca. Selain keterbatasan alat tangkap dan meningkatnya biaya operasional, nelayan juga masih bergantung pada pengepul dalam pemasaran hasil tangkapan sehingga posisi tawar mereka relatif rendah. Akibatnya, sebagian besar rumah tangga nelayan belum memiliki sumber pendapatan alternatif di luar sektor perikanan. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan yang menjelaskan bahwa sebagian besar nelayan merupakan nelayan skala kecil dengan armada dan alat tangkap tradisional atau semi-modern. Meskipun Kabupaten Seruyan memiliki potensi perikanan yang besar, kesejahteraan nelayan masih rendah akibat pendapatan yang tidak stabil

dan tingginya ketergantungan pada kondisi alam. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi dan kelembagaan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan nelayan kecil bersifat multidimensional. Keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, lemahnya akses pasar, dan ketergantungan pada pengepul saling berkaitan sehingga memperkuat kerentanan ekonomi nelayan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan tidak cukup melalui bantuan sarana produksi, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis nilai tambah sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir

Literasi Keuangan Nelayan Kecil

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nelayan kecil di Kabupaten Seruyan masih relatif rendah. Sebagian besar nelayan belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis sehingga pendapatan dari hasil penjualan ikan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa memisahkan keuangan usaha dan keluarga. Kondisi ini menyulitkan nelayan dalam mengetahui keuntungan usaha, merencanakan kebutuhan modal, maupun menyiapkan dana cadangan saat musim paceklik. Pengelolaan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum didasarkan pada perencanaan usaha yang terstruktur. Temuan tersebut diperkuat oleh perangkat desa yang menyatakan bahwa kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan usaha masih memerlukan pendampingan. Sebagian besar nelayan belum terbiasa menyusun pembukuan sederhana maupun perencanaan keuangan sehingga keuntungan usaha belum dimanfaatkan secara optimal untuk investasi dan pengembangan usaha. Dari perspektif pemerintah daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan menilai bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan kebutuhan penting dalam pemberdayaan nelayan.

Selama ini program pemerintah lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana penangkapan dan penguatan kelompok nelayan, sedangkan pelatihan pengelolaan keuangan usaha masih perlu diperkuat agar nelayan mampu mengelola pendapatan dan memanfaatkan akses pembiayaan formal secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha nelayan kecil. Keterbatasan dalam menyusun pembukuan, mengelola arus kas, dan merencanakan penggunaan modal menyebabkan usaha perikanan sulit berkembang. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu menjadi salah satu komponen utama dalam model pemberdayaan nelayan kecil. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa literasi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan,

pengelolaan usaha, dan akses terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks nelayan kecil di Kabupaten Seruyan, peningkatan literasi keuangan diharapkan mampu mendorong pencatatan usaha, perencanaan investasi, pemanfaatan pembiayaan formal, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal sehingga mendukung kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha perikanan.

Kewirausahaan Perikanan sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha nelayan kecil di Kabupaten Seruyan masih didominasi oleh penjualan ikan segar tanpa pengolahan lebih lanjut. Sebagian besar nelayan berorientasi pada hasil tangkapan harian sehingga pendapatan sangat bergantung pada harga pasar dan jumlah tangkapan. Wawancara menunjukkan bahwa kemampuan mengembangkan usaha, melakukan diversifikasi produk, dan memanfaatkan pemasaran digital masih terbatas akibat kurangnya pengetahuan, modal, dan akses pasar. Temuan tersebut diperkuat oleh perangkat desa yang menjelaskan bahwa potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Seruyan cukup besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti ikan asin, ikan asap, kerupuk ikan, abon ikan, dan terasi. Namun, pengembangannya masih terkendala oleh rendahnya keterampilan pengolahan, minimnya inovasi produk, pengemasan yang belum optimal, serta lemahnya strategi pemasaran sehingga sebagian besar nelayan masih menjual hasil tangkapan sebagai bahan baku.

Dari perspektif Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, pengembangan kewirausahaan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berbagai program, seperti pelatihan pengolahan hasil perikanan, pembentukan kelompok usaha, bantuan peralatan, dan pendampingan telah dilaksanakan, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan pendamping, rendahnya partisipasi nelayan, dan belum optimalnya kemitraan usaha untuk memperluas akses pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan perikanan tidak hanya berkaitan dengan penjualan hasil tangkapan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai tambah melalui inovasi produk, diversifikasi usaha, dan pengembangan jaringan pemasaran. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan perlu menjadi bagian utama dalam pemberdayaan melalui pelatihan berbasis praktik, pendampingan usaha, penguatan pemasaran digital, dan kemitraan dengan koperasi maupun pelaku usaha. Dalam penelitian ini, kewirausahaan perikanan menjadi pilar kedua dalam model pemberdayaan karena berperan dalam meningkatkan pendapatan, daya saing, dan kemandirian ekonomi nelayan kecil.

Peran Kelembagaan dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan wawancara dengan nelayan, kelompok nelayan telah menjadi wadah untuk memperoleh informasi mengenai bantuan pemerintah, pelatihan, dan program pembinaan. Namun, fungsi kelompok nelayan belum berjalan optimal karena masih berfokus pada aspek administratif dan belum berkembang sebagai lembaga ekonomi yang mampu memperkuat posisi tawar, memperluas akses permodalan, serta membangun jaringan pemasaran hasil perikanan. Temuan tersebut diperkuat oleh perangkat desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mendukung pengembangan sektor perikanan melalui fasilitasi kelompok nelayan, koordinasi dengan Dinas Perikanan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan memerlukan sinergi antara pemerintah desa, Dinas Perikanan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

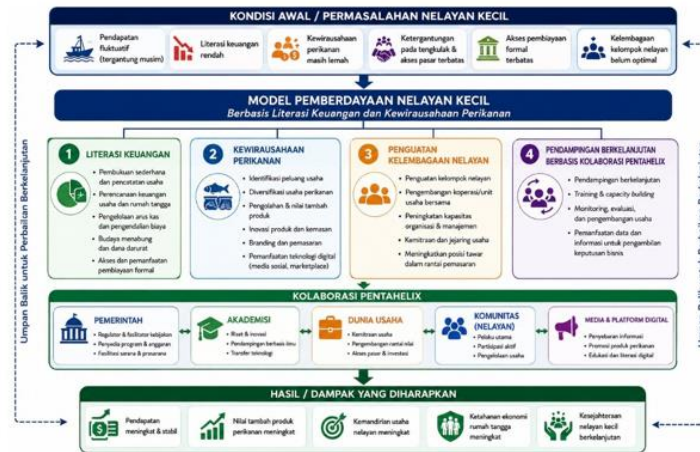
Dari perspektif Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, seperti penyediaan sarana penangkapan, pelatihan teknis, penyuluhan, pembentukan kelompok nelayan, dan fasilitasi bantuan pemerintah. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh keterbatasan penyuluh, luasnya wilayah pendampingan, rendahnya keberlanjutan pascapelatihan, serta belum optimalnya integrasi antara peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah program, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan dan kolaborasi pentahelix menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan nelayan kecil. Kelompok nelayan yang aktif dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, kerja sama ekonomi, dan akses informasi, sedangkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku usaha, masyarakat, dan media digital mampu memperluas akses terhadap pembiayaan, teknologi, inovasi, dan pasar. Dalam penelitian ini, pendekatan pentahelix menjadi salah satu komponen utama Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan. Model ini dikembangkan dari temuan bahwa permasalahan nelayan kecil tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal dan rendahnya produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, terbatasnya kemampuan kewirausahaan, lemahnya kelembagaan kelompok nelayan, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, model yang diusulkan mengintegrasikan peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi multipihak dalam satu sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Model pemberdayaan terdiri atas empat pilar utama, yaitu: Literasi keuangan sebagai fondasi pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan belum melakukan pencatatan keuangan, belum memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta belum memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan diarahkan pada pembukuan sederhana, perencanaan usaha, pengelolaan arus kas, budaya menabung, dan pemanfaatan akses pembiayaan formal.

Kewirausahaan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi usaha. Mayoritas nelayan masih menjual hasil tangkapan dalam bentuk ikan segar, sehingga pendapatan sangat bergantung pada harga pasar dan musim. Pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan, peningkatan kualitas produk dan kemasan, pengembangan merek, serta pemanfaatan pemasaran digital untuk memperluas akses pasar. Penguatan kelembagaan nelayan bertujuan meningkatkan fungsi kelompok nelayan sebagai media pembelajaran, kerja sama, dan pengembangan usaha. Model ini mendorong penguatan kapasitas organisasi, perluasan kemitraan, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan posisi tawar nelayan sehingga kelompok nelayan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang berkelanjutan. Pendampingan berkelanjutan berbasis kolaborasi pentahelix melibatkan Dinas Perikanan, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan media digital. Setiap pihak memiliki peran sesuai kompetensinya dalam penyusunan kebijakan, pendampingan, inovasi, pembiayaan, dan pemasaran sehingga proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga implementasi, monitoring, dan evaluasi. Integrasi keempat pilar tersebut membentuk sistem pemberdayaan yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Melalui peningkatan literasi keuangan, penguatan

kewirausahaan, kelembagaan yang efektif, dan kolaborasi pentahelix, model ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar dan pembiayaan, menciptakan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Seruyan.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Pemberdayaan Nelayan Kecil Berbasis Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Perikanan di Kabupaten Seruyan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan kecil masih dipengaruhi oleh pendapatan yang fluktuatif, rendahnya literasi keuangan, terbatasnya kemampuan kewirausahaan, lemahnya kelembagaan, keterbatasan akses pembiayaan formal, serta ketergantungan pada pengepul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan model pemberdayaan yang dibangun atas empat pilar, yaitu literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, dan kolaborasi pentahelix melalui pendampingan berkelanjutan. Integrasi keempat pilar tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, akses pembiayaan dan pasar, serta kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Model ini juga menjadi acuan konseptual dan praktis bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan nelayan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Seruyan, khususnya Dinas Perikanan, disarankan mengembangkan program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan, kewirausahaan perikanan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Implementasi program perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah,

pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga keuangan, koperasi, pelaku usaha, serta partisipasi aktif kelompok nelayan dalam pengembangan usaha dan pemasaran digital. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model ini pada wilayah pesisir dengan karakteristik yang berbeda menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*. Selain itu, model dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel seperti transformasi digital, inklusi keuangan, penguatan rantai nilai perikanan, dan keberlanjutan kelembagaan untuk memperkaya kajian pemberdayaan nelayan kecil.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, D., Sontang, M., & Supsilani, S. (2022). Profil sosial ekonomi keluarga nelayan tradisional untuk penyediaan data program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 8(1).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan. (2024). *Kabupaten Seruyan dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Darmono, D., Herlina, S., & Triyadin, S. (2025). Model pemataan sosial ekonomi dan tantangan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Seruyan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 2732–2745. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6678>
- Gai, A. M. (2020). Konsep pemberdayaan nelayan pesisir Kota Surabaya sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim berbasis sustainable livelihood. *Jurnal Planoeath*, 5(1). <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.2153>
- Guest, G., Namey, E. E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusnadi. (2021). *Sosiologi dan pemberdayaan masyarakat pesisir*. Graha Ilmu.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putalan, R., Farid, Hakiem, D. H., Imran, M., & Azzahra, A. A. (2025). Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan branding, pemasaran digital, dan edukasi keuangan UMKM produk perikanan di Kelurahan Leato Selatan. *Jurnal Abdimas Terapan*, 5(1), 22–27. <https://doi.org/10.56190/jat.v5i1.104>

- Rahmatiah, Ibrahim, R., Adam, Y., Rumanbi, W. P., & Bumulo, S. (2025). Pemasaran produk perikanan berbasis digital pada masyarakat nelayan di Desa Oluhuta Kabupaten Bone Bolango. *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i3.380>
- Sangko, A. N., Lengkong, F., & Kolondam, H. (2024). Strategi pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan pada masyarakat pesisir di Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55–64. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i1.54683>
- Sumandiyar, A., Nur, H., & Muin, A. (2024). Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Phinisi Integration Review*, 7(1). <https://doi.org/10.26858/pir.v7i1.59423>